

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Cilegon memiliki hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum perubahan–perubahan tersebut pada dasarnya tidak mengubah prinsip–prinsip anggaran yang meliputi efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat serta struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Namun apabila kita mencermati secara teknis akuntansi, dapat diketahui bahwa telah terjadi berbagai perubahan baik di bidang pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan

daerah, serta perubahan pada klasifikasi jenis, obyek, dan rincian obyek beserta kode rekeningnya.

Wujud konkrit dari pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Rencana kerja pemerintah dalam bentuk kerangka pendanaan bagi semua program dan kegiatan dalam kerangka waktu satu tahun anggaran.

Adanya perubahan peraturan pada tahun 2007 dimana penyusunan anggaran pada tahun 2005 dan 2006 masih berpedoman kepada keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan pada tahun 2007 penyusunan APBD sudah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.1
Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Pendapatan

STRUKTUR PENDAPATAN	
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
Pendapatan	Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah	Pajak Daerah
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah
Bagian Laba Usaha Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan	Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	
	Lain-lain Pendapatan yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang Sah	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 3.2
Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Belanja

STRUKTUR BELANJA	
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
Belanja	Belanja
Aparatur Daerah	Belanja Tidak Langsung
Belanja Administrasi Umum	Belanja Pegawai
Belanja Pegawai/Personalia	Belanja Bunga
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi
Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah
Belanja Pemeliharaan	Belanja Bantuan Sosial
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Pegawai/Personalia	Belanja Tidak Terduga
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Langsung
Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Pegawai
Belanja Pemeliharaan	Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal	Belanja Modal
Pelayanan Publik	
Belanja Administrasi Umum	
Belanja Pegawai/Personalia	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Perjalanan Dinas	
Belanja Pemeliharaan	
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
Belanja Pegawai/Personalia	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Perjalanan Dinas	
Belanja Pemeliharaan	
Belanja Modal	
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	
Belanja Tidak Tersangka	
Jumlah Belanja	

Tabel 3.3
Perubahan Peraturan Terhadap Struktur Pembiayaan

STRUKTUR PEMBIAYAAN	
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
Pembiayaan	Pembiayaan Daerah
Penerimaan Daerah	Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	
Transfer dari Dana Cadangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi

STRUKTUR PEMBIAYAAN	
	Daerah
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Penerimaan Piutang Daerah
	Pencairan Dana Deposito
Jumlah Penerimaan Daerah	
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Daerah	
Transfer ke Dana Cadangan	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal	Pembayaran Pokok Utang
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Pemberian Pinjaman Daerah
Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Berjalan	Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito
Pembayaran Proyek Lanjutan	
Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ke III	Pembiayaan Netto
Jumlah Pengeluaran Daerah	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Jumlah Pembiayaan	
Sisa Perhitungan	

Perubahan peraturan tersebut telah merubah struktur belanja dan pembiayaan pada kurun waktu 2005-2006 dan 2007-2009 sehingga pembahasan kebijakan keuangan akan dibagi dua periode yaitu periode yang menggunakan Kepmendagri 29 tahun 2002 dan periode yang menggunakan Permendagri 13 tahun 2006 yang kemudian diikuti dengan ditetapkannya Permendagri 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri 13 tahun 2006.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya visi Kota Cilegon.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A. Target dan Realisasi Pendapatan

Berikut ini diuraikan mengenai target dan realisasi pendapatan dalam APBD Kota Cilegon dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011.

A.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2005

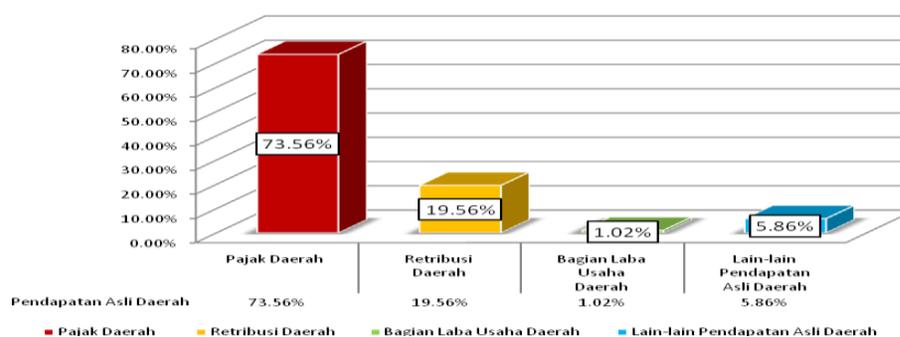
Tahun 2005 realisasi pendapatan adalah sebesar 306 milyar lebih besar 2 persen dari yang direncanakan yaitu sebesar 299 milyar, kontributor terbesar pada kenaikan realisasi pendapatan berada pada pos dana perimbangan yang terealisasi 11 milyar lebih besar dari yang di rencanakan dari 199 milyar yang di rencanakan pos tersebut terealisasi sebesar 211 milyar, yang diikuti oleh pos lain-lain pendapatan yang sah yang naik dari yang direncanakan yaitu sebesar 4.9 milyar menjadi 5.6 milyar yang terealisasi.

Tabel 3.4
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2005

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	299,659,543,700.00	306,475,845,768.00	102.27%
Pendapatan Asli Daerah	95,189,393,700.00	89,748,352,796.00	94.28%
Dana Perimbangan	199,533,000,000.00	211,101,492,972.00	105.80%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	4,937,150,000.00	5,626,000,000.00	113.95%

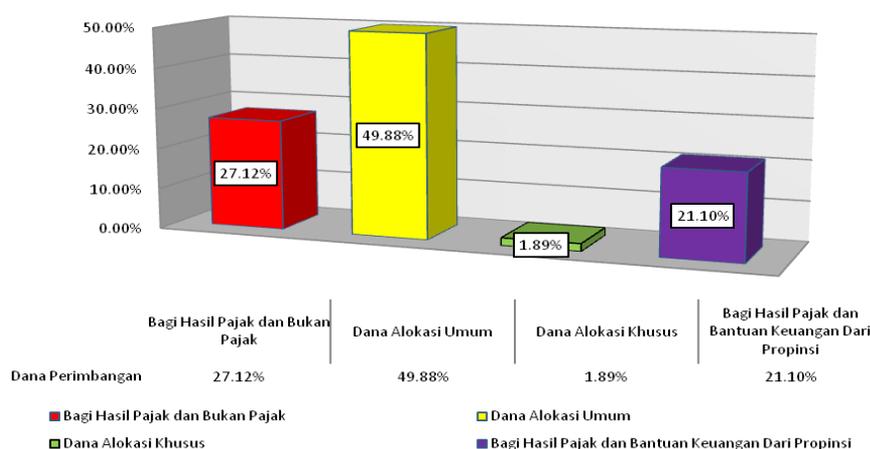
Sedangkan pos pendapatan asli daerah dari yang direncanakan sebesar 95 milyar hanya terealisasi sebesar 89 milyar.

Gambar 3.1
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005



Berdasarkan strukturnya pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dari total pendapatan asli daerah yaitu sebesar 73.56% diikuti oleh retribusi daerah sebesar 18.44 %.

Gambar 3.2
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2005



Pada pos dana perimbangan kontribusi terbesar berada pada pos dana alokasi umum dengan kontribusi sebesar 49.88 % diikuti dengan pos bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 27.12%.

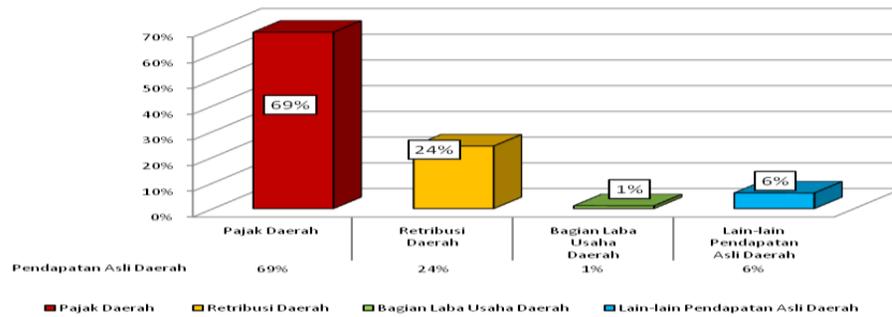
A.2. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2006

Tahun 2006 realisasi pendapatan adalah sebesar 413 milyar nilai tersebut melebihi ekspektasi perencanaan dimana pendapatan pada tahun 2006 di ekspektasikan sebesar 394 milyar. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah yang direncanakan pada 2006 sebesar 104 milyar ternyata pada realisasinya menjadi 112 milyar, selain pendapatan asli daerah dana perimbangan juga melebihi ekspektasi perkiraan dimana pada saat direncanakan dana perimbangan diperkirakan sebesar 289 milyar ternyata pada saat direalisasikan nilainya mencapai 300 milyar.

Tabel 3.5
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2006

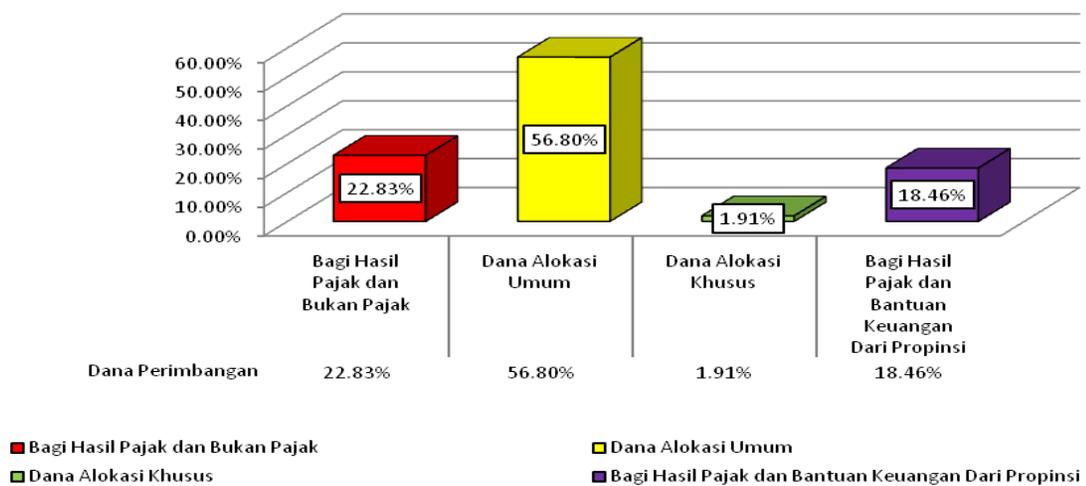
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	394,528,229,700.00	413,078,843,529.00	104.70%
Pendapatan Asli Daerah	104,750,459,700.00	112,242,853,817.00	107.15%
Dana Perimbangan	289,777,770,000.00	300,835,989,712.00	103.82%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-

Gambar 3.3
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006



Berdasarkan struktur PAD pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dari total pendapatan asli daerah yaitu sebesar 69 % diikuti oleh retribusi daerah sebesar 24%.

Gambar 3.4
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2006



Berdasarkan strukturnya kontribusi terbesar untuk dana perimbangan masih sama seperti tahun 2005 yaitu dana alokasi umum sebesar 58.80% diikuti oleh bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 22.83%, sedangkan untuk pos lain-lain pendapatan pada tahun 2005 karena ada nya pelaksanaan pilkada dan adanya dana penyeimbang DAU sedangkan pada tahun 2006 dana tersebut tidak ada sehingga pada tahun 2006 tidak ada realisasi pada pos lain-lain pendapatan yang sah.

A.3. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2007

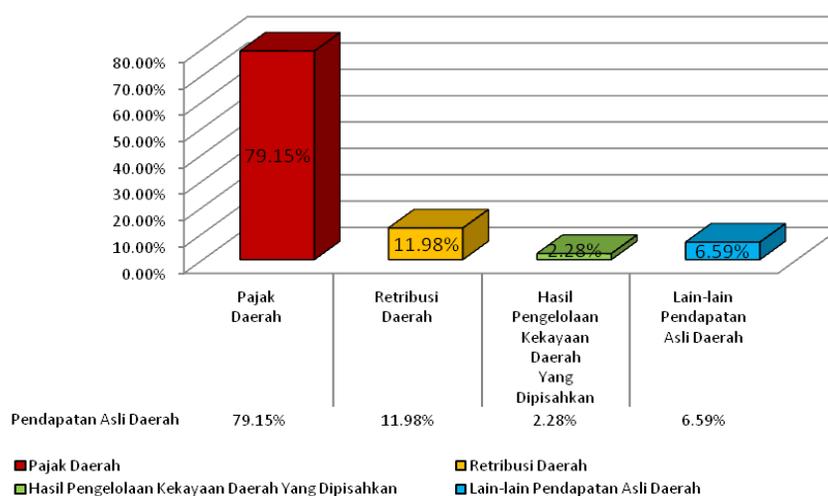
Pada Tahun 2007 terdapat perubahan pedoman penyusunan APBD hal terkait dengan terbitnya permendagri 13 tahun 2006 dimana pada struktur pendapatan komponen bagi

hasil pajak dan bantuan dari provinsi dimasukkan pada pos lain-lain pendapatan yang sah bukan pada pos dana perimbangan. Untuk realisasi pendapatan, pada tahun 2007 realisasi pendapatan berada dibawah ekspektasi dimana pada perencanaannya diekspektasikan sebesar 464 milyar namun pada saat realisasinya adalah sebesar 462 milyar. Penurunan ekspektasi tersebut disebabkan oleh turunnya realisasi bagi hasil pajak provinsi yang diekspektasikan sebesar 42 milyar namun pada saat direalisasikan adalah sebesar 32 milyar.

Tabel 3.6
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2007

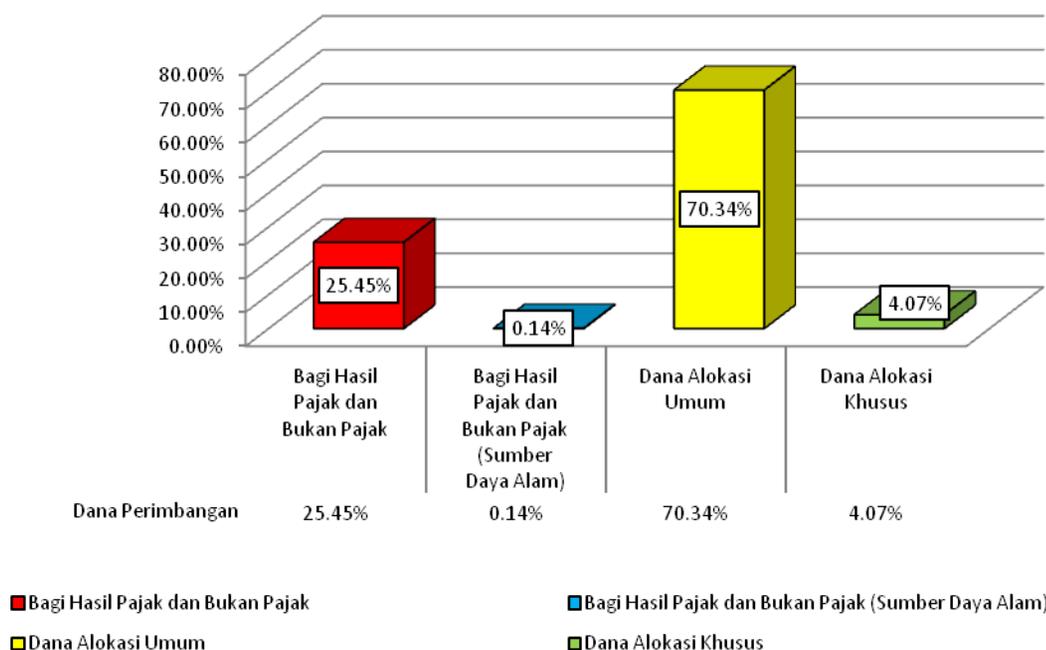
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	464,018,741,817.00	462,168,029,416.00	99.60%
Pendapatan Asli Daerah	85,779,891,817.00	92,625,606,151.00	107.98%
Dana Perimbangan	315,623,750,000.00	317,495,473,693.00	100.59%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	62,615,100,000.00	52,046,949,572.00	83.12%

Gambar 3.5
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2007



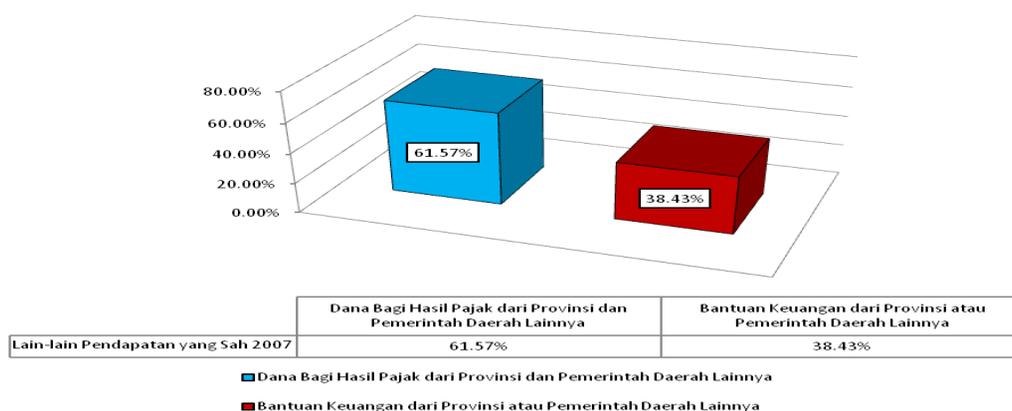
Kontribusi terbesar pada PAD tahun 2007 jika dilihat dari strukturnya berasal dari komponen pajak daerah dimana pada realisasinya memberikan kontribusi sebesar 79.15 % disusul oleh retribusi daerah sebesar 11.98 %.

Gambar 3.6
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2007



Pada pos dana perimbangan komponen kontribusi terbesar berada pada komponen dana alokasi umum yaitu sebesar 70.76 % diikuti oleh bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 25.60 %.

Gambar 3.7
Struktur Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2007



Pada komponen lain-lain pendapatan yang sah tahun 2007 masih di dominasi oleh dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 61.57%, sedangkan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar 38.43%.

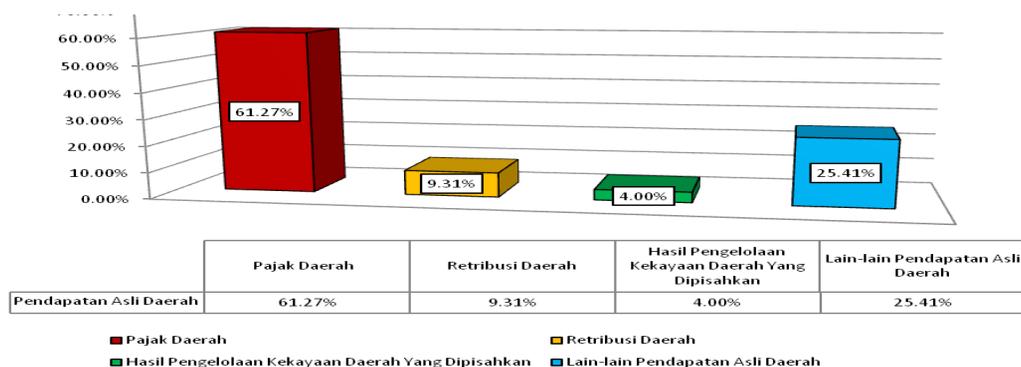
A.4. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2008

Realisasi pendapatan pada tahun 2008 berada di bawah ekspektasi dari yang direncanakan sebesar 561 milyar hanya terealisasi sebesar 554 milyar, hal ini disebabkan oleh realisasi seluruh komponen pendapatan yang berada dibawah ekpektasi mulai dari komponen pendapatan asli daerah yang di rencanakan sebesar 130 milyar hanya terealisasi 129 milyar, komponen dana perimbangan yang di rencanakan sebesar 365 milyar hanya terealisasi sebesar 364 milyar dan dari komponen Lain-lain pendapatan yang sah dari 65 milyar yang direncanakan hanya terealisasi 60 milyar.

Tabel 3.7
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2008

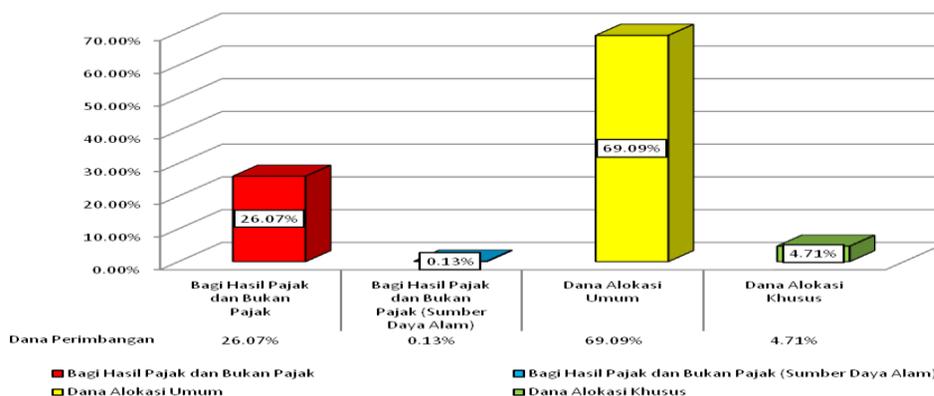
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	561,258,190,381.00	554,373,094,897.00	98.77%
Pendapatan Asli Daerah	130,670,503,038.00	129,831,026,861.00	99.36%
Dana Perimbangan	365,355,019,343.00	364,178,442,009.00	99.68%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	65,232,668,000.00	60,363,626,027.00	92.54%

Gambar 3.8
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2008



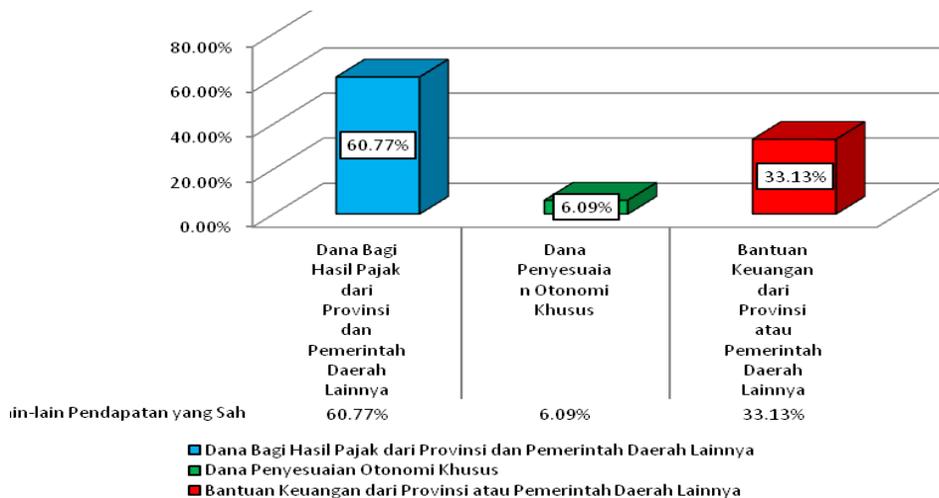
Kontribusi terbesar pada PAD tahun 2008 jika dilihat dari strukturnya berasal dari komponen pajak daerah dimana pada realisasinya memberikan kontribusi sebesar 61.27 % disusul oleh lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 25.41 %.

Gambar 3.9
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2008



Pada komponen dana perimbangan kontribusi terbesar berada pada komponen dana alokasi umum yaitu sebesar 69.09 % diikuti oleh bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 26.07 %.

Gambar 3.10
Struktur Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Cilegon Tahun 2008



Pada komponen lain-lain pendapatan yang sah tahun 2008 terdapat komponen dana penyesuaian otonomi khusus dimana komponen tersebut tidak terdapat pada tahun 2007, pos lain lain pendapatan yang sah masih di dominasi oleh dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 60.77%, sedangkan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar 33.13%.

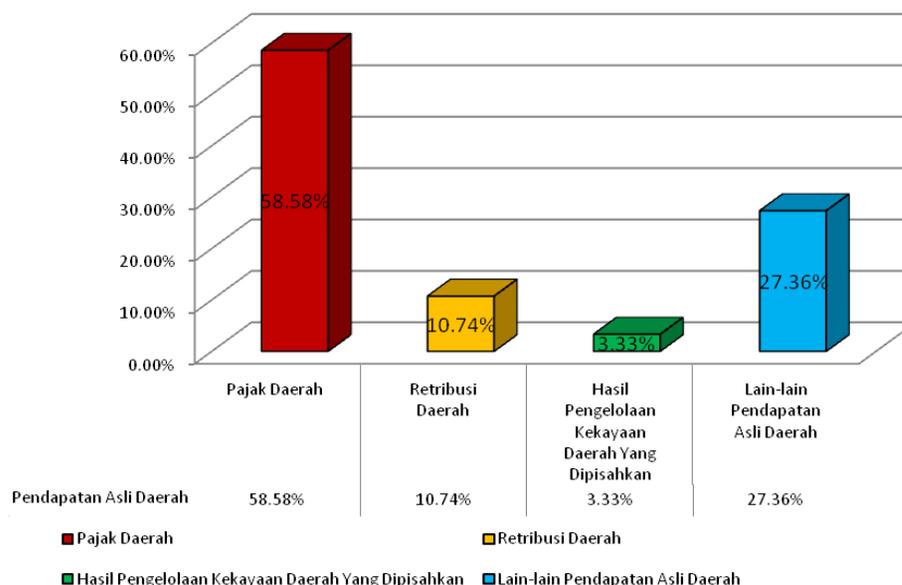
A.5. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2009

Berdasarkan realisasinya pendapatan kota cilegon pada tahun 2009 tetap berada di bawah ekspektasi dari yang direncanakan, hal ini terlihat dari perkiraan pendapatan sebesar 620 milyar hanya terealisasi sebesar 600 milyar, hal ini disebabkan dari pos pendapatan yang berasal dari Swakelola RSUD yang atas rekomendasi BPK tidak dimasukkan ke dalam APBD, sedangkan dana perimbangan ternyata terealisasi melebihi ekspektasi dari yang direncanakan sebesar 427 milyar terealisasi sebesar 438 milyar, dan komponen lain-lain pendapatan yang sah pun ternyata melebihi ekspektasi dari 59 milyar yang direncanakan menjadi 63 milyar pada saat realisasi

Tabel 3.8
Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2009

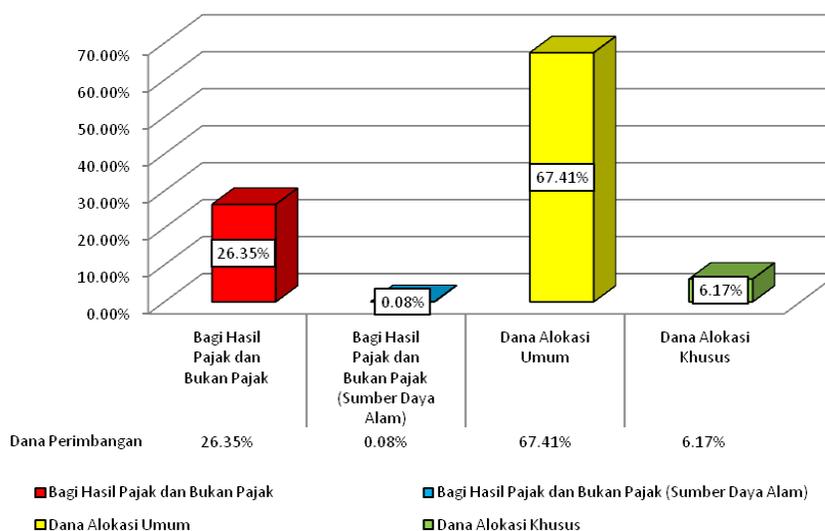
URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan	620,825,997,935.00	600,063,567,143.00	96.66%
Pendapatan Asli Daerah	134,204,104,988.00	98,793,263,133.00	73.61%
Dana Perimbangan	427,613,957,327.00	438,140,629,157.00	102.46%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	59,007,935,620.00	63,129,674,853.00	106.99%

Gambar 3.11
Struktur Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009



Berdasarkan strukturnya dapat dilihat bahwa pajak daerah masih mendominasi pendapatan asli daerah kota Cilegon tahun 2009 dengan kontribusi sebesar 58.58 %, sedangkan kontributor terbesar kedua diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 27.36%.

Gambar 3.12
Struktur Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2009



Pada pos dana perimbangan kontribusi terbesar berada pada dana alokasi umum dengan kontribusi sebesar 67.41% dan diikuti oleh dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 26.35%.

A.6. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2010

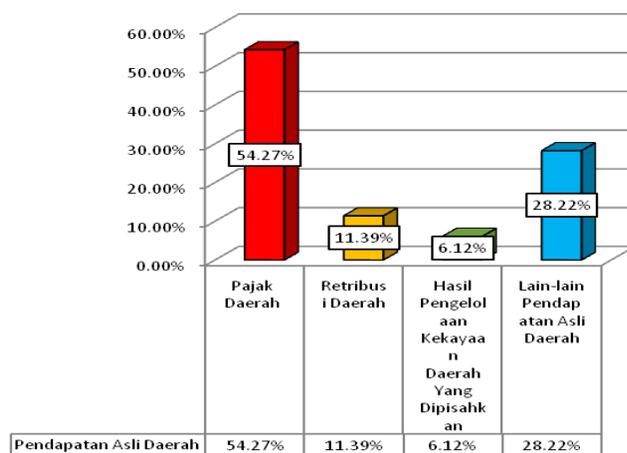
Pendapatan pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 598 Milyar terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 138 milyar, dana perimbangan sebesar 385 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 74 milyar.

Tabel 3.9
Target Pendapatan Tahun 2010

	Target
Pendapatan	598,203,728,000.00
Pendapatan Asli Daerah	138,392,767,000.00
Dana Perimbangan	385,068,207,000.00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	74,742,754,000.00

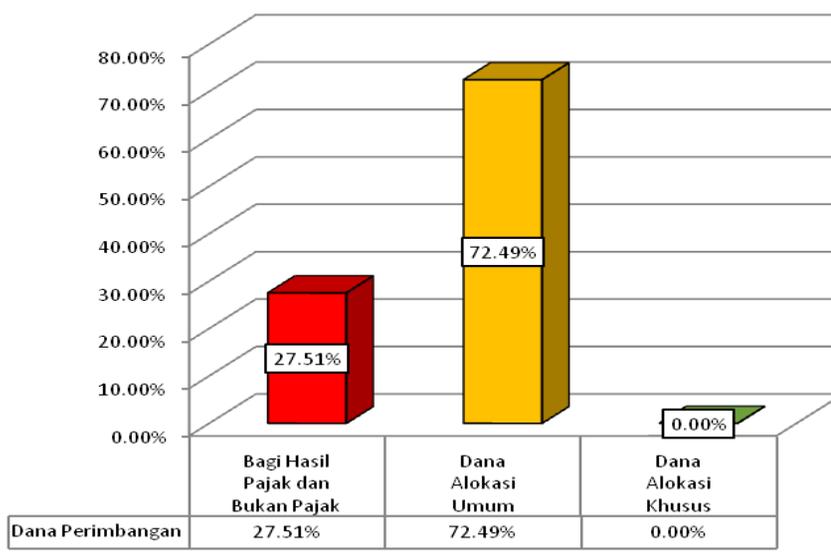
Jika dilihat dari strukturnya target pendapatan asli daerah pada tahun 2010, di perkirakan berasal dari pajak daerah 54.27%, retribusi daerah sebesar 11.39%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6.12% dan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 28.22%.

Gambar 3.13
Target Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2010



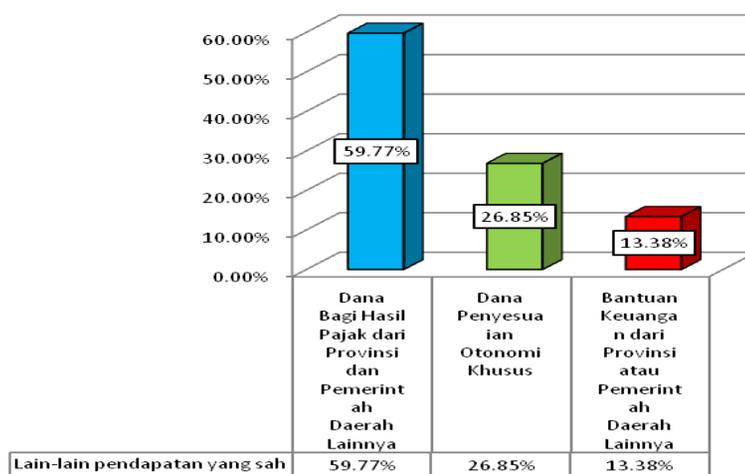
Pada dana perimbangan tahun 2010 strukturnya diperkirakan terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 27.51% dan dana alokasi umum sebesar 72.49%, sedangkan pada tahun 2010 kota Cilegon tidak mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Gambar 3.14
Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun 2010



Untuk lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2010 strukturnya diperkirakan terdiri dari dana bagi hasil pajak dan pemerintah daerah lainnya sebesar 59.77%, dana penyesuaian otonomi khusus sebesar 26.85% dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar 13.38%.

Gambar 3.15
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Cilegon Tahun 2010



B. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan peningkatan kemampuan pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah dilakukan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dengan metode intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber penerimaan daerah, yang dilaksanakan sejalan dengan peningkatan kemampuan pengelolaan perusahaan daerah dan pemanfaatan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi dana perimbangan dan sumber dana lainnya dari pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Banten.

Secara umum intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini telah ada dan berupaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Penataan pendapatan daerah sebagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pendanaan yang terus meningkat, yaitu untuk menyelenggarakan tata pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun hingga saat ini kemandirian kapasitas fiskal pemerintah daerah masih relatif terbatas, sebagaimana tercermin dari persentase kontribusi PAD terhadap APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah antara lain berorientasi kepada penyederhanaan berbagai jenis dan prosedur administrasi perijinan, penetapan tarif retribusi daerah, dan pajak daerah. Upaya ini

dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penataan secara intensifikasi ini dapat menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pengusaha dan pelaku dunia usaha lainnya, antara lain melalui rasionalisasi jenis pungutan, penyempurnaan struktur tarif, dan prosedur perijinan. Pertumbuhan investasi daerah telah menunjukkan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan dan peningkatan investasi daerah pada akhirnya dapat memacu kenaikan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*, yang pada waktunya akan meningkatkan secara akumulatif kapasitas perekonomian daerah serta kemampuan fiskal daerah.

Upaya lain dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu melalui ekstensifikasi, yaitu menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan antara lain melalui upaya pendayagunaan pemanfaatan potensi daerah dan usaha daerah dengan tidak terlalu membebani masyarakat serta dunia usaha.

Strategi yang ditempuh dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan berkesinambungan terhadap sumber-sumber PAD;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah provinsi.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dan strategi tersebut di atas, prioritas yang dilaksanakan dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan PAD diprioritaskan melalui intensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diprioritaskan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi. Dengan strategi dan prioritas ini diharapkan akan meningkatkan kepuasan wajib pajak dan

wajib retribusi yang pada akhirnya akan mendorong kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak dan retribusi daerah;

3. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Dengan strategi dan prioritas ini diharapkan target pendapatan dan penerimaan asli daerah dapat dicapai dengan tepat waktu.

Berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahun dengan laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Demikian pula upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang hasilnya mampu meningkatkan alokasi dana sebagai sumber pendapatan daerah.

Namun, untuk alokasi dana perimbangan pada setiap tahunnya disesuaikan dengan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Penyesuaian yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan umum keuangan daerah Kota Cilegon ke depan diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah dan penggalan potensi pendapatan daerah dengan mendorong penguatan ekonomi daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah pada dasarnya diarahkan pada upaya penggalan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi terutama atas pajak daerah dan retribusi daerah yang ada serta ekstensifikasi atas peluang pendapatan asli daerah lainnya secara efektif dan efisien.

C. Neraca Daerah

Neraca daerah Kota Cilegon sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Neraca Daerah
Kota Cilegon Tahun 2006-2009

KD. REK	URAIAN	2006 (Juta Rp.)	2007 (Juta Rp.)	2008 (Juta Rp.)	2009 (Juta Rp.)
1	ASET				
1.1	ASET LANCAR				
1.1.1	Kas	21.884,79	39.362,81	2.931,20	16.821,08
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3	Piutang	29.203,42	29.218,01	21.593,83	16.201,68
1.1.4	Piutang Lain-lain	4.544,20	7.856,91	8.603,21	14.959,41
1.1.5	Persediaan	2.959,35	2.944,58	4.421,76	5.354,26
	JUMLAH ASET LANCAR	73.591,77	99.382,30	57.550,00	73.336,42
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1.2.1	Investasi Non Permanen	5.091,18	7.639,45	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	38.043,20	56.793,20	78.197,23	107.398,16
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	43.134,38	64.432,65	78.197,23	107.398,16
1.3	ASET TETAP				
1.3.1	Tanah	413.788,53	325.518,21	567.507,96	580.935,08
1.3.2	Peralatan dan Mesin	89.661,69	115.887,23	140.133,05	164.693,21
1.3.3	Gedung dan Bangunan	253.802,00	268.292,31	364.690,57	416.068,09
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	248.094,32	217.393,22	260.897,76	453.231,55
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	9.270,22	10.878,28	13.645,66	15.552,45
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	94.072,29	266.138,29	194.241,39	49.177,75
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	1.108.689,07	1.204.107,54	1.541.116,39	1.679.658,13
1.4	DANA CADANGAN				
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA				
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	216,76	216,76
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0,00	9.425,36	17.123,45	21.180,60
1.5.5	Aset Lain-lain	1.635,45	3.390,11	9.479,82	18.900,47
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.635,45	12.815,47	26.820,03	40.297,83
	JUMLAH ASET	1.227.050,67	1.380.737,97	1.703.683,67	1.900.690,54
2	KEWAJIBAN				
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3,09	10,56	7,89	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	96,67	59,72	15,57
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka	0,00	10.570,59	9.381,15	3.622,43

KD. REK	URAIAN	2006 (Juta Rp.)	2007 (Juta Rp.)	2008 (Juta Rp.)	2009 (Juta Rp.)
	Panjang				
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.700,29	1.327,56	5.191,85	469,34
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.703,38	12.005,38	14.640,61	4.107,34
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0.00	13.108,06	3.575,19	0.00
2.2.2	Utang Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	13.108,06	3.575,19	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.703,38	25.113,43	18.215,81	4.107,34
3	EKUITAS DANA				
3.1	EKUITAS DANA LANCAR				
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	36.881,71	59.253,98	22.603,02	35.711,29
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	33.747,62	37.074,92	30.197,04	31.161,74
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	2.959,35	2.944,58	4.421,76	5.354,26
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.700,29)	(11.994,82)	(14.632,72)	(4.107,34)
3.1.5	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0.00	98,27	320,29	1.109,78
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	71.888,39	87.376,93	42.909,39	69.229,74
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI				
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	43.134,38	64.432,65	78.197,23	107.398,16
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.108.689,07	1.204.107,54	1.541.116,39	1.679.658,13
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	1.635,45	12.815,47	26.820,03	40.297,17
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0.00	(13.108,06)	(3.575,19)	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.153.458,90	1.268.247,61	1.642.558,46	1.827.353,46
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN				
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.225.347,29	1.355.624,53	1.685.467,85	1.896.583,19
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.227.050,67	1.380.737,97	1.703.683,67	1.900.690,54

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2005-2011

Perubahan pedoman dari Kepmendagri 29 tahun 2002 menjadi Permendagri 13 tahun 2006 telah merubah struktur belanja secara signifikan, dimana pada periode 2005-2006 pos belanja dibagi menjadi belanja aparatur dan belanja publik, dan pada periode 2007-2011 terjadi perubahan pos belanja menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, hal ini merubah secara signifikan sub komponen dari pos belanja sehingga pembahasan tentang pos belanja akan dibagi menjadi dua periode yaitu periode 2005-2006 dan periode 2007-2011.

A.1. Target dan Realisasi Belanja Periode Tahun 2005-2006

Target dan realisasi belanja tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 susunan APBD mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

A.1.1. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2005

Pada tahun 2005 realisasi belanja secara keseluruhan berada di bawah perencanaannya dimana belanja direalisasikan sebesar 290 milyar dari 320 milyar yang direncanakan, komponen belanja aparatur daerah tahun 2005 direncanakan sebesar 98 milyar direalisasikan sebesar 85 milyar, komponen belanja pelayanan publik direalisasikan sebesar 204 milyar dari 222 milyar yang direncanakan.

Tabel 3.11
Rencana Dan Realisasi Belanja Tahun 2005

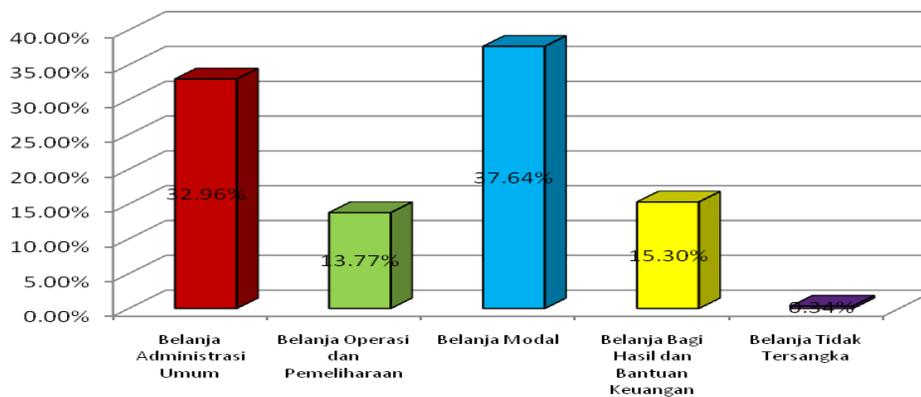
URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	320,895,777,585.00	290,178,861,784.00	90.43%
Aparatur Daerah	98,434,099,396.00	85,585,789,131.00	86.95%
Pelayanan Publik	222,461,678,189.00	204,593,072,653.00	91.97%

Gambar 3.16
Struktur Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2005



Jika dilihat dari strukturnya belanja aparatur daerah terdiri dari 52.27% belanja administrasi umum, 29.86% belanja operasi dan pemeliharaan dan 12.86% belanja Modal.

Gambar 3.17
Struktur Belanja Pelayanan Publik Tahun 2005



Jika dilihat dari komposisinya, belanja pelayanan publik terdiri dari belanja modal 37.64%, belanja administrasi umum sebesar 32.96%, belanja operasi dan pemeliharaan sebesar 13.77%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar 15.30% dan belanja tidak tersangka sebesar 0.34%.

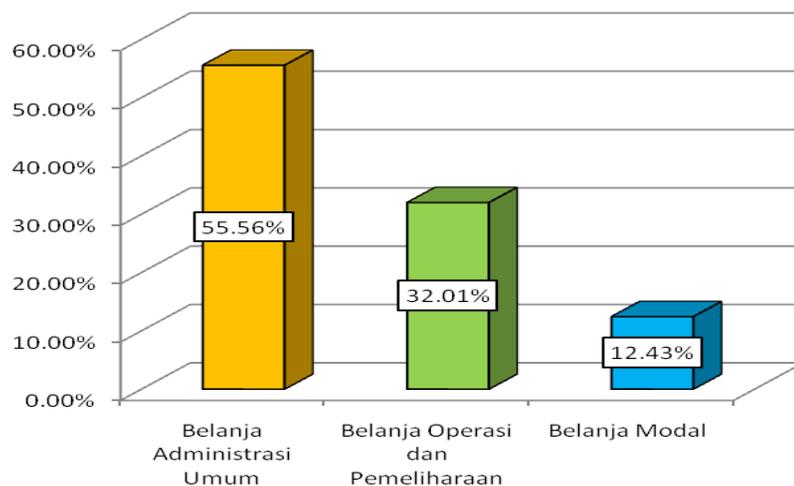
A.1.2. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2006

Tabel 3.12
Rencana Dan Realisasi Belanja Tahun 2006

URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	470,029,748,035.67	404,438,185,238.00	86.05%
Aparatur Daerah	133,212,568,325.00	107,689,155,497.00	80.84%
Pelayanan Publik	336,817,179,710.67	296,749,029,741.00	88.10%

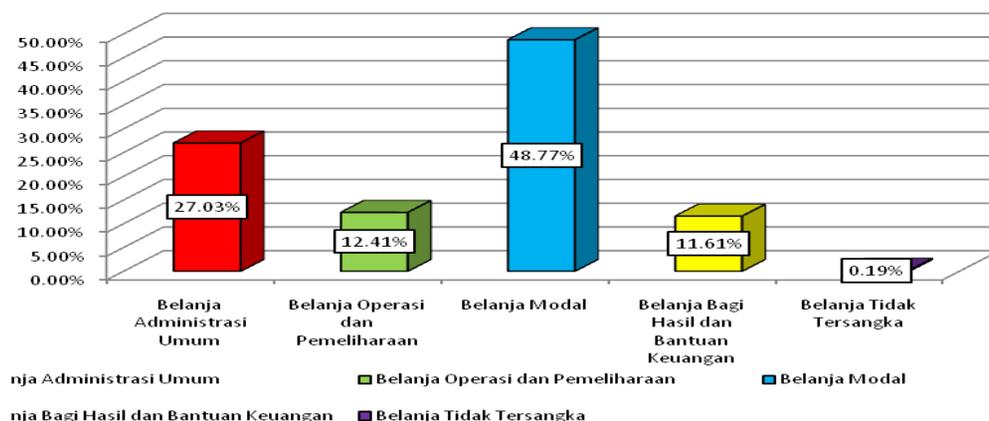
Untuk tahun 2006 realisasi belanja berada di bawah perencanaannya hal ini terlihat dari realisasi total belanja yang terealisasi 404 milyar dibandingkan rencana belanja yang sebesar 470 milyar, untuk komponen belanja aparatur daerah direalisasikan sebesar 107 milyar dari 133 milyar yang direncanakan, sedangkan belanja pelayanan publik dari 336 milyar yang direncanakan terealisasi sebesar 296 milyar.

Gambar 3.18
Struktur Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2006



Pada tahun 2006 belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi umum sebesar 55.56%, belanja operasional dan pemeliharaan sebesar 32.01% dan belanja modal sebesar 12.43%.

Gambar 3.19
Struktur Belanja Pelayanan Publik Kota Cilegon Tahun 2006

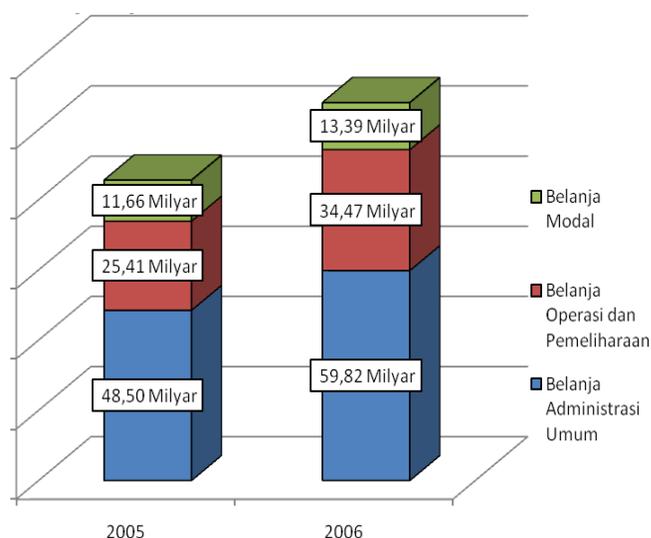


Berdasarkan komposisi belanjanya struktur belanja pelayanan publik didominasi oleh belanja modal sebesar 48.77%, belanja administrasi umum sebesar 27.03%, belanja operasional dan pemeliharaan sebesar 12.41%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak tersangka sebesar 0.19%.

A.1.3. Trend Perkembangan Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik kota Cilegon 2005-2006

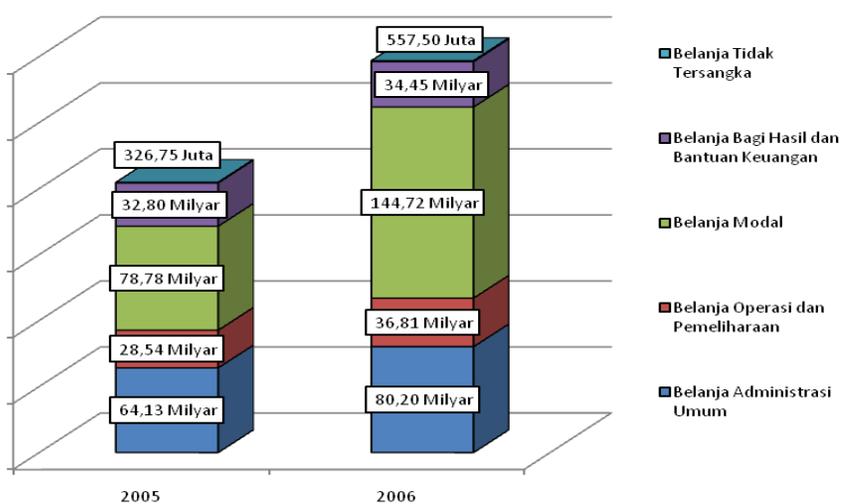
Belanja aparatur daerah dari periode 2005 -2006 meningkat sebesar 22 milyar, kenaikan yang signifikan terjadi pada komponen belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan dimana masing-masing komponen naik sebesar 11.30 milyar dan 9.06 milyar, sedangkan dari komponen belanja modal hanya naik sebesar 1.7 milyar.

Gambar 3.20
Belanja Aparatur Daerah Kota Cilegon Tahun 2005-2006



Untuk belanja pelayanan publik terjadi kenaikan sebesar 92 milyar, kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal yaitu sebesar 65 milyar, diikuti oleh belanja administrasi umum sebesar 16 milyar, belanja modal sebesar 8 milyar, belanja tidak tersangka sebesar 1.6 milyar dan belanja tidak tersangka sebesar 230 juta.

Gambar 3.21
Belanja Pelayanan Publik Kota Cilegon Tahun 2005-2006



A.2. Periode 2007-2009 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006)

A.2.1. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2007

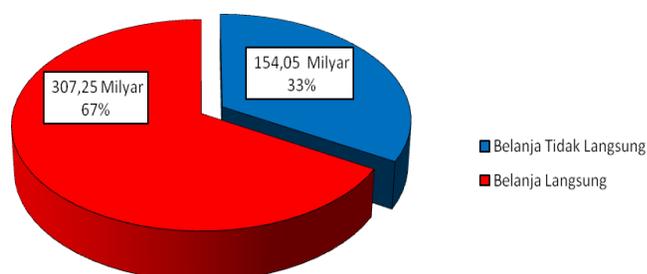
Permendagri no. 13 tahun 2006 merubah secara signifikan struktur belanja yang sebelumnya dibagi berdasarkan belanja aparatur dan belanja publik sekarang dirubah menjadi belanja langsung dan tidak langsung.

Tabel 3.13
Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2007

URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	544,167,212,118.00	461,303,980,066.00	84.77%
Belanja Tidak Langsung	190,594,880,905.00	154,053,799,159.00	80.83%
Belanja Langsung	353,572,331,213.00	307,250,180,907.00	86.90%

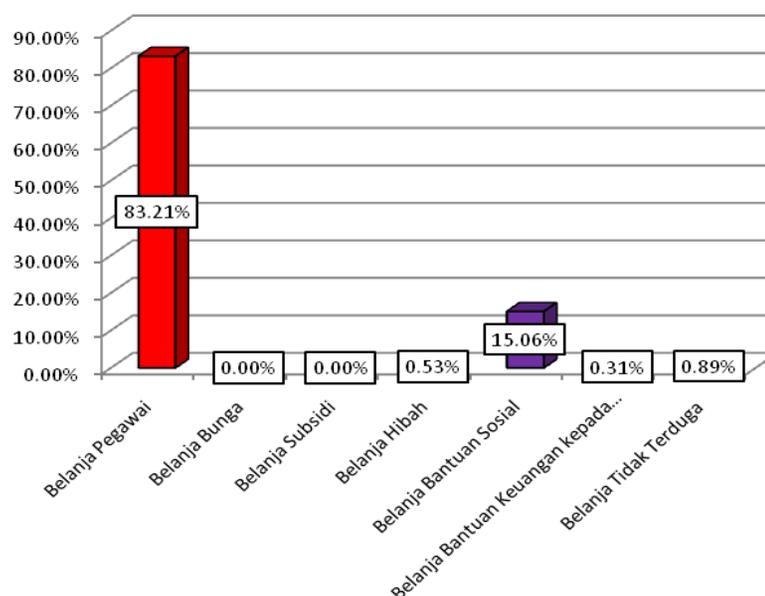
Pada tahun 2007 total realisasi belanja kota Cilegon adalah sebesar 461 milyar, yang terbagi atas 154 milyar belanja tidak langsung dan 307 milyar belanja langsung, terdapat perubahan pos anggaran pada tahun 2007 dimana belanja hibah dan bantuan sosial masuk ke dalam belanja tidak langsung, hal ini menandakan bahwa anggaran untuk masyarakat tidak hanya ada di dalam belanja langsung namun ada juga di dalam belanja tidak langsung.

Gambar 3.22
Struktur Belanja Kota Cilegon Tahun 2007



Dilihat dari strukturnya belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 83.21%, belanja bantuan sosial sebesar 15.06%, belanja hibah sebesar 0.53%, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar 0.31% dan belanja Tidak terduga sebesar 0.89%.

Gambar 3.23
Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun 2007



Untuk belanja langsung pada tahun 2007 terdiri dari belanja modal sebesar 56.29%, belanja barang dan jasa sebesar 27.85%, dan belanja pegawai sebesar 15.86%.

Gambar 3.24
Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2007



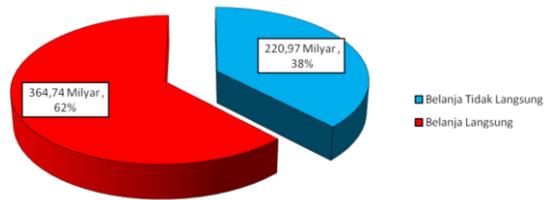
A.2.2. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2008

Total realisasi belanja pada tahun 2008 adalah sebesar 585 milyar dari yang direncanakan sebesar 659 milyar, total realisasi tersebut didapat dari pos belanja tidak langsung sebesar 220 milyar dan pos belanja langsung sebesar 364 milyar.

Tabel 3.14
Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2008

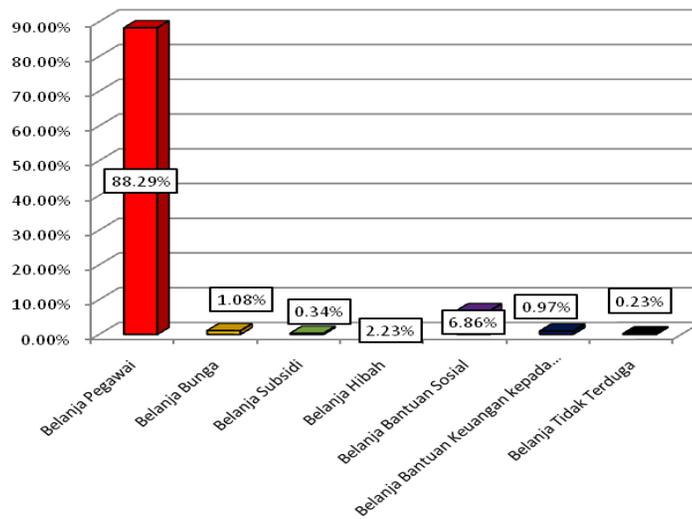
URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	659,559,067,871.00	585,723,003,908.00	88.81%
Belanja Tidak Langsung	249,233,077,567.00	220,974,850,422.00	88.66%
Belanja Langsung	410,325,990,304.00	364,748,153,486.00	88.89%

Gambar 3.25
Struktur Belanja Tahun 2008



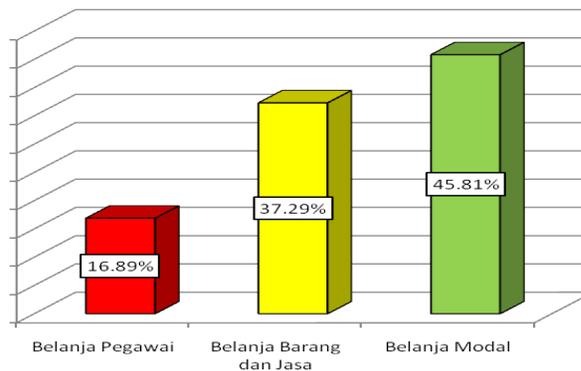
Pada tahun 2008 struktur belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 88.29%, belanja bantuan sosial sebesar 6.86%, belanja bunga sebesar 1.08%,

Gambar 3.26
Struktur Belanja Tidak Langsung Tahun 2008



belanja hibah sebesar 2.23%, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa 0.97% , belanja subsidi sebesar 0.34% dan belanja tidak terduga sebesar 0.23 %.

Gambar 3.27
Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2008



Pada tahun 2008 struktur belanja langsung terdiri dari belanja modal sebesar 45.81%, belanja barang dan jasa sebesar 37.29% dan belanja pegawai sebesar 16.89%.

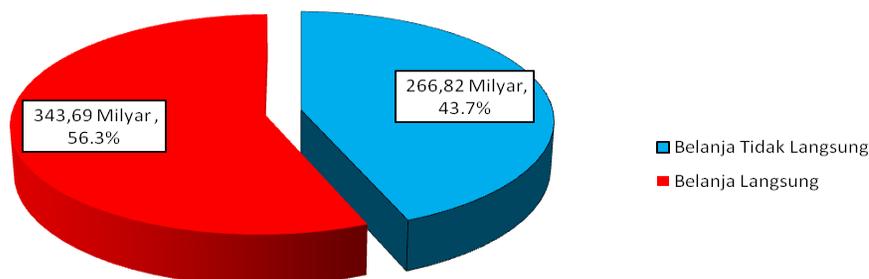
A.2.3. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2009

Realisasi belanja pada tahun 2009 terealisasi sebesar 610 milyar, nilai realisasi tersebut didapat dari realisasi belanja tidak langsung sebesar 266 milyar dan belanja langsung sebesar 343 milyar.

Tabel 3.15
Rencana Dan Realisasi Tahun 2009

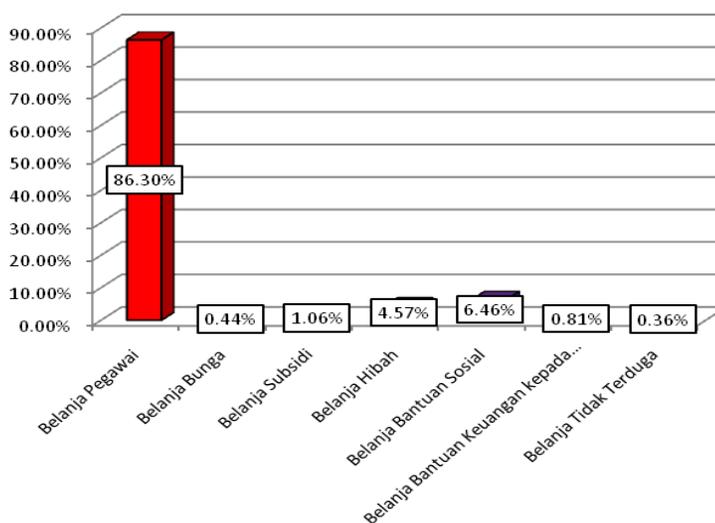
URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
BELANJA	643,853,142,693.00	582,812,916,251.00	94.82%
Belanja Tidak Langsung	275,618,593,009.00	266,821,196,621.00	96.81%
Belanja Langsung	368,234,549,684.00	315,991,719,630.00	93.33%

Gambar 3.28
Struktur Belanja Kota Cilegon Tahun 2009



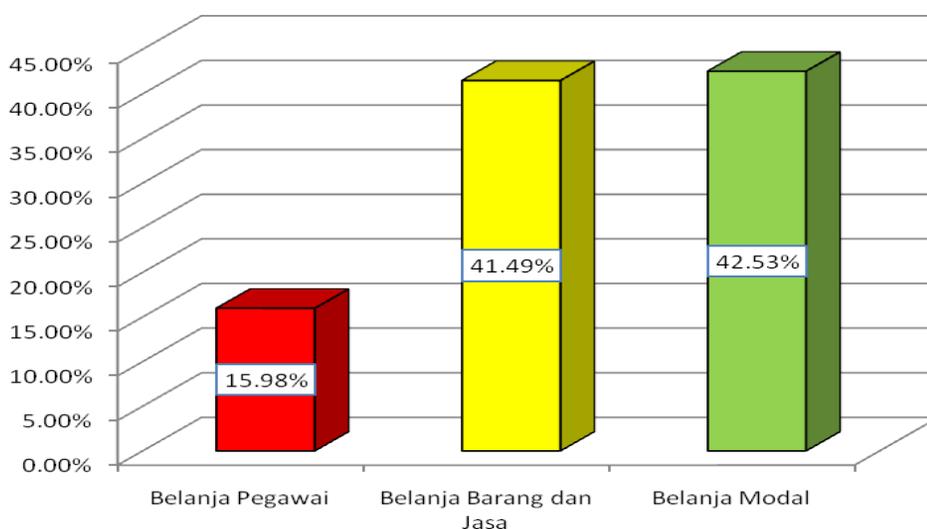
Pada tahun 2009 belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai sebesar 86.30%, belanja bantuan sosial sebesar 6.46%, belanja hibah sebesar 4.57%, belanja subsidi sebesar 1.06%.

Gambar 3.29
Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun 2009



Belanja bunga sebesar 0.44%, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar 0.81% dan belanja tidak terduga sebesar 0.36%.

Gambar 3.30
Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2009



Untuk belanja langsung pada tahun 2009 terdiri atas belanja modal sebesar 42.53%, belanja barang dan jasa sebesar 41.49%, dan belanja pegawai sebesar 15.98%.

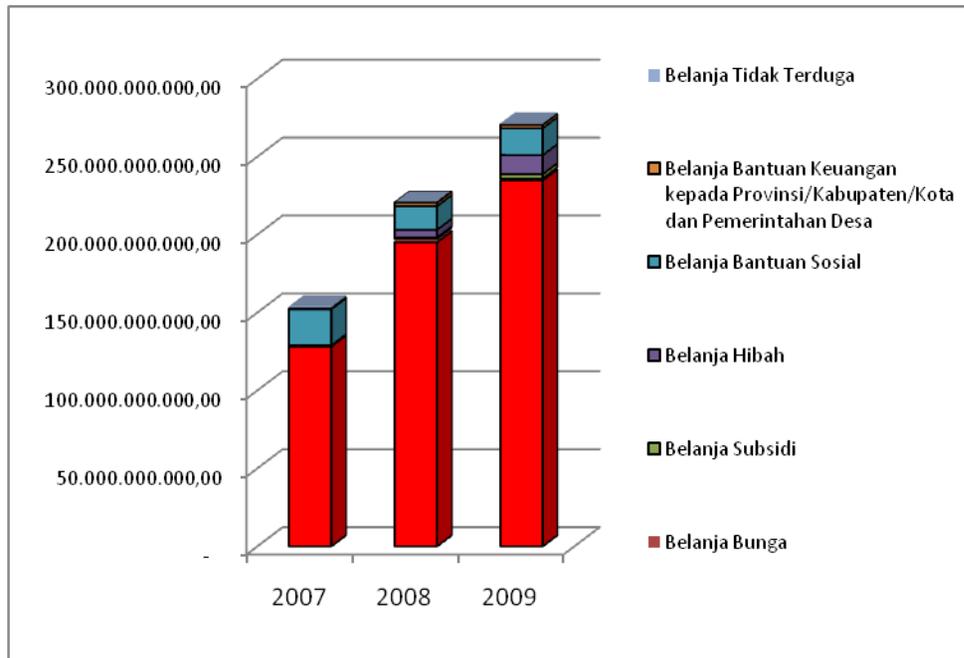
A.2.4. Trend Realisasi Belanja 2007-2009

Jika dilihat selama periode 2007-2009 belanja tidak langsung mengalami kenaikan, mulai dari 154 milyar pada tahun 2007, menjadi 220 milyar pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 266 milyar. Kenaikan secara signifikan terjadi pada komponen belanja pegawai dimana pada tahun 2008 naik sebesar 66 milyar, hal ini disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah penambahan jumlah pegawai baru dan pemekaran SOTK berdasarkan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penambahan jumlah pegawai pada tahun 2009 membuat belanja pegawai naik dari 195 milyar menjadi 230 milyar, digulirkannya program bantuan masyarakat langsung pada tahun 2009 telah menaikkan belanja Bantuan sosial dari 15 milyar pada tahun 2008 menjadi 17 milyar pada tahun 2009. Sedangkan dilihat dari prosentase masing-masing komponen pada Belanja tidak langsung, alokasi belanja pegawai merupakan proporsi terbesar, dengan rata-rata sekitar 83%, dengan jumlah nominal yang terus meningkat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penambahan jumlah PNS serta adanya kenaikan gaji pegawai. Maka jika dikorelasikan dengan peningkatan pendapatan DAU, namun hal ini juga diimbangi dengan kenaikan alokasi belanja pegawai.

Tabel 3.16
Realisasi Belanja Tidak Langsung 2007-2009

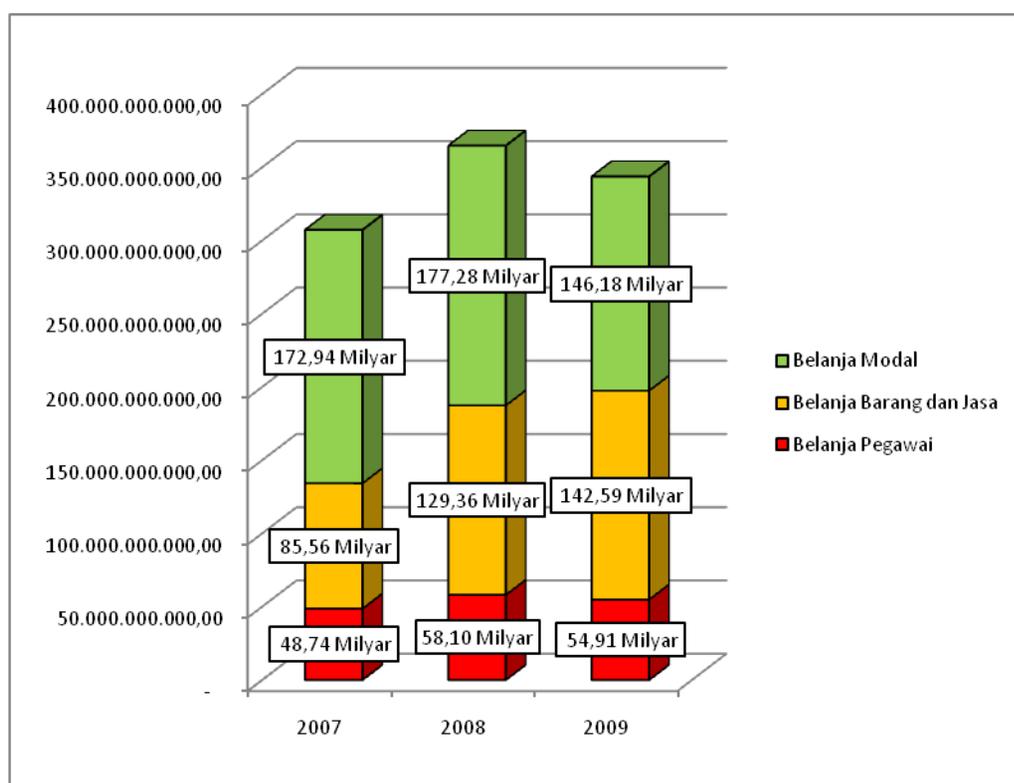
Uraian	2007		2008		2009	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Belanja Tidak Langsung	154,053,799,159	100.0	220,974,850,422	100.0	266,821,196,621	100.0
Belanja Pegawai	128,191,806,957	83.2	195,091,867,797	88.3	230,267,526,874	86.3
Belanja Bunga	-	0	2,390,277,108	1.1	1,183,609,003	0.4
Belanja Subsidi	-	0	759,805,517	0.3	2,832,221,744	1.1
Belanja Hibah	820,000,000	0.5	4,917,900,000	2.2	12,197,599,000	4.6
Belanja Bantuan Sosial	23,203,437,650	15.1	15,165,000,000	6.9	17,228,485,000	6.5
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	473,000,000	0.3	2,150,000,000	1.0	2,149,520,000	0.8
Belanja Tidak Terduga	1,365,554,552	0.9	500,000,000	0.2	962,235,000	0.4

Gambar 3.31
Tren Realisasi Belanja Langsung



Pada pos belanja langsung kenaikan yang signifikan terjadi pada pos belanja barang dan jasa pada tahun 2008 dimana terjadi kenaikan sebesar 43 milyar dibandingkan belanja barang dan jasa tahun 2007, hal ini terjadi karena adanya pemekaran SOTK pada tahun 2008 karena diterbitkannya PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, karena jumlah SOTK mempengaruhi jumlah kegiatan yang harus di akomodir maka perubahan tersebut juga akan mempengaruhi jumlah belanja barang dan jasa, belanja modal naik dari 172.94 milyar pada tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada tahun 2009 sebesar 177 milyar dan kemudian pada tahun 2009 turun menjadi 146.18 milyar. Kenaikan pada tahun 2008 karena penyelesaian pekerjaan pembangunan infrastruktur di usahakan selesai sebagian besar pada tahun 2008.

Gambar 3.32.
Tren Belanja Langsung 2007-2009



Tabel 3.17
Realisasi Belanja 2007-2009

	2007	2008	2009
Belanja Langsung	307,250,180,907.00	364,748,153,486.00	343,691,561,773.00
Belanja Pegawai	48,740,556,689.00	58,100,151,463.00	54,917,043,198.00
Belanja Barang dan Jasa	85,567,193,049.00	129,360,079,724.00	142,594,000,731.00
Belanja Modal	172,942,431,169.00	177,287,922,299.00	146,180,517,844.00

A.2.5. Rencana Belanja Tahun 2010

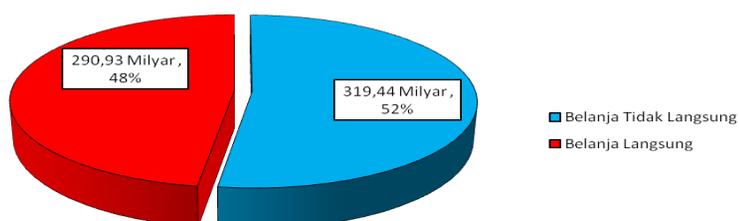
Berdasarkan perencanaannya pada perda no 17 tahun 2009. Belanja pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 610 milyar, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 319 milyar dan belanja langsung 290 milyar.

Tabel 3.18
Rencana Belanja Tahun 2010

	RENCANA
BELANJA	610,376,136,000.00
Belanja Tidak Langsung	319,443,781,000.00
Belanja Langsung	290,932,355,000.00

Gambar 3.33.

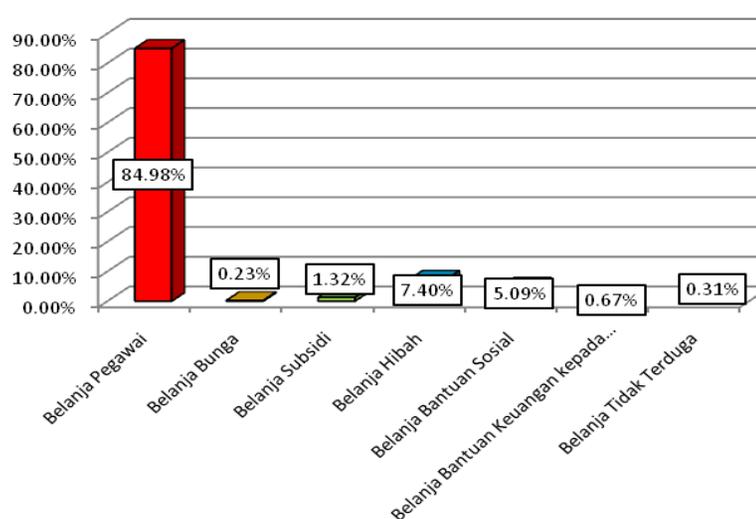
Struktur Rencana Belanja Kota Cilegon Tahun 2010



Pada tahun 2010 belanja langsung di perkirakan terdiri dari belanja pegawai sebesar 84.98%, belanja hibah sebesar 7.4%, belanja bantuan sosial sebesar 5.09%, belanja subsidi sebesar 1.32%, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar 0.67% dan belanja tidak terduga sebesar 0.31%.

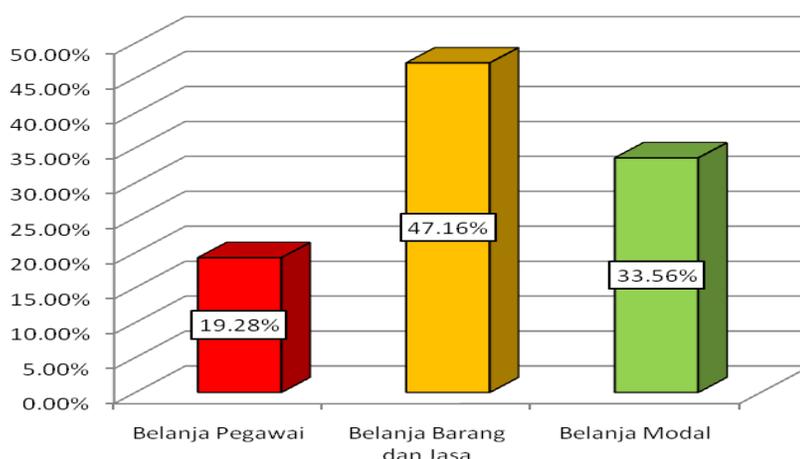
Gambar 3.34

Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon tahun 2010



Untuk belanja langsung pada tahun 2010 terdiri atas belanja pegawai sebesar 19.28%, belanja barang dan jasa sebesar 47.16% dan belanja modal sebesar 33.56%.

Gambar 3.35.
Struktur Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun 2010



B. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penatausahaan belanja setiap tahun masih mengalami permasalahan. Secara eksternal permasalahan timbul akibat sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta adanya dinamika masyarakat yang menginginkan percepatan pelaksanaan pembangunan yang berhadapan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang masih relatif terbatas.

1. Permasalahan

Permasalahan yang di hadapi dalam rangka keuangan daerah tahun 2005 hingga 2009 adalah sebagai berikut :

- a. SDM di bidang Pengelolaan Keuangan terutama dalam hal penyusunan APBD dan laporan keuangan masih menghadapi kendala dalam hal kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Sarana dan prasarana penunjang untuk menyikapi peraturan perundangan-undangan yang selalu berkembang dalam kurun waktu tersebut masih kurang, terutama dalam penyempurnaan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- c. Banyaknya peraturan-perundangan yang harus segera di pahami oleh pengelola keuangan di SKPD membuat banyaknya interpretasi yang masih kurang sehingga masih tersendatnya penyusunan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.
- d. Banyaknya peraturan perundangan dari pusat yang memerlukan peraturan turunannya untuk memperjelas/menjabarkan sehingga dalam kurun waktu tahun 2005

s/d 2006 baru pada tahap penyusunan atau penertiban peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan dasar pengelolaan keuangan di Kota Cilegon.

2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan bintek/kursus singkat/sosialisasi terhadap pejabat pengelola keuangan sampai kepada tataran pelaksana pengelola keuangan di Kota Cilegon secara terus-menerus.
- b. Bekerja sama dengan pihak BPKP dalam hal penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan, dalam hal pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang sampai dengan tahun 2009 sudah berjalan dengan baik.
- c. Menyusun beberapa produk hukum terkait dengan turunan produk hukum dari pusat seperti, Perda, Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah, Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan lain sebagainya, sebagai penunjang dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan belanja daerah agar dapat memenuhi kebutuhan belanja sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, maka sesuai dengan ketentuan yang ada dimungkinkan adanya pembiayaan pengeluaran yaitu transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus apabila jumlah pendapatan daerah lebih besar dari total belanja daerah.

C. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada upaya mengefektifkan dan mengefesienkan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan bidang pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dengan fokus utama penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur dalam bidang pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial fasilitas umum yang layak yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perubahan pedoman dari kepmendagri no 29 tahun menjadi permendagri 13 tahun 2006 merubah struktur pembiayaan daerah, sehingga pembahasan komponen pembiayaan akan dibagi dua periode yaitu periode 2005-2006 dan 2007-2009

A. Target dan Realisasi Pembiayaan

A.1. Pembiayaan Daerah Tahun 2005

Tabel 3.19
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2005

PEMBIAYAAN	RENCANA	REALISASI
Penerimaan Daerah	39,908,936,855.00	36,851,871,230.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	36,908,936,855.00	36,851,871,230.00
Transfer dari Dana Cadangan	-	-
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	3,000,000,000.00	-
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-
Jumlah Penerimaan Daerah	39,908,936,855.00	36,851,871,230.00
Pengeluaran Daerah	18,672,702,970.00	18,150,002,670.00
Transfer ke Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	8,929,278,070.00	8,929,278,070.00
Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Berjalan	-	-
Pembayaran Proyek Lanjutan	4,674,224,900.00	4,506,675,900.00
Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ke III	1,069,200,000.00	714,048,700.00
Jumlah Pengeluaran Daerah	18,672,702,970.00	18,150,002,670.00
Jumlah Pembiayaan	21,236,233,885.00	18,701,868,560.00
Sisa Perhitungan	-	34,998,852,544.00

Dari pos penerimaan daerah pada tahun 2005 terealisasi sebesar 36 milyar, ha ini dicapai dengan memasukan silpa tahun 2004 sebesar 36 milyar. Dari pos pengeluaran daerah terealisasi sebesar 18 milyar yang terdiri dari penyertaan modal sebesar 4 milyar, pembayaran utang jatuh tempo sebesar 8.9 milyar, pembayaran proyek lanjutan sebesar 4.5 milyar dan penyelesaian kewajiban kepada piha ketiga sebesar 714 juta, sehingga selisih antara pengeluaran dan penerimaan daerah adalah sebesar 18.15 milyar. Sehingga jika ditambahkan kepada surplus selisih antara pendapatan dan belanja sebesar 16 milyar maka sisa perhitungan pada tahun 2005 adalah sebesar 34.99 milyar.

A.2. Pembiayaan Daerah Tahun 2006

Tabel 3.20
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon Tahun 2006

PEMBIAYAAN	RENCANA	REALISASI
Penerimaan Daerah	101,304,713,544.00	34,998,855,544.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	34,998,855,544.00	34,998,855,544.00
Transfer dari Dana Cadangan	-	
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	66,305,858,000.00	
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan		
Jumlah Penerimaan Daerah	101,304,713,544.00	34,998,855,544.00
Pengeluaran Daerah	25,803,195,208.33	43,639,513,835.00
Transfer ke Dana Cadangan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Penyertaan Modal	9,527,600,000.00	9,527,600,000.00
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	9,906,860,208.33	3,000,000,000.00
Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Berjalan	-	21,881,706,135.00
Utang Belanja Bangunan Gedung	368,735,000.00	274,625,000.00
Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ke III	1,000,000,000.00	997,102,700.00
Pengeluaran Di Luar Anggaran		2,958,480,000.00
Jumlah Pengeluaran Daerah	25,803,195,208.33	43,639,513,835.00
Jumlah Pembiayaan	75,501,518,335.67	-8,640,658,291.00
Sisa Perhitungan	-	-

Dari pos penerimaan daerah pada tahun 2006 terealisasi sebesar 34 milyar, ha ini dicapai dengan memasukan silpa tahun 2005 sebesar 34 milyar. Dari pos pengeluaran daerah terealisasi sebesar 43 milyar yang terdiri dari penyertaan modal sebesar 9.5 milyar, pembayaran utang jatuh tempo sebesar 3 milyar, utang belanja bangunan gedung sebesar 274 juta dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga sebesar 997 juta, sehingga selisih antara pengeluaran dan penerimaan daerah adalah minus 8.6 milyar. Sehingga jika ditambahkan kepada surplus selisih antara pendapatan dan belanja sebesar 8.6 milyar maka sisa perhitungan pada tahun 2006 adalah nihil.

A.3. Pembiayaan Daerah Tahun 2007

Tabel 3.21
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2007

PEMBIAYAAN DAERAH	RENCANA	REALISASI	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	124,354,470,296.00	59,387,810,140.00	47.76%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	19,127,324,938.00	19,127,324,938.00	100.00%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	89,852,331,363.00	20,000,000,000.00	22.26%
Penerimaan Piutang Daerah	15,374,813,995.00	20,260,485,202.00	131.78%
Pencairan Dana Deposito			
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	44,205,999,995.00	24,581,000,000.00	55.61%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,250,000,000.00	18,750,000,000.00	92.59%
Pembayaran Pokok Utang	7,155,999,995.00	531,000,000.00	7.42%
Pemberian Pinjaman Daerah	1,800,000,000.00	300,000,000.00	16.67%
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00	33.33%
Pembiayaan Netto	80,148,470,301.00	34,806,810,140.00	43.43%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	36,937,017,959.00	

Pada tahun 2007 komponen penerimaan daerah terealisasi sebesar 59 milyar yang berasal dari komponen SiLpa Tahun anggaran sebelumnya sebesar 19 milyar, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebesar 20 milyar dan penerimaan piutang daerah sebesar 20.6 milyar, sedang dari komponen pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar 24 milyar yang berasal dari komponen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 18.75 milyar, pembayaran pokok utang sebesar 531 juta, pemberian pinjaman daerah sebesar 300 juta dan investasi jangka pendek dalam deposito sebesar 5 milyar, sehingga selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar 34.8 milyar sehingga jika di tambahkan kepada selisih pendapatan dan belanja sebesar 864 juta maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaannya adalah sebesar 36.9 milyar.

A.4. Pembiayaan Daerah Tahun 2008

Tabel 3.22
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2008

PEMBIAYAAN DAERAH	RENCANA	REALISASI	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,670,859,490.00	55,287,997,769.00	42.64%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35,670,859,490.00	35,670,859,490.00	100.00%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	70,000,000,000.00	-	0.00%
Penerimaan Piutang Daerah	24,000,000,000.00	19,617,138,279.00	81.74%
Pencairan Dana Deposito			

PEMBIAYAAN DAERAH	RENCANA	REALISASI	%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31,369,982,000.00	21,335,072,000.00	68.01%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	100.00%
Pembayaran Pokok Utang	18,369,982,000.00	8,335,072,000.00	45.37%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	-	-	
Pembiayaan Netto	98,300,877,490.00	33,952,925,769.00	34.54%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	2,603,016,758.00	

Pada tahun 2008 komponen penerimaan daerah terealisasi sebesar 55 milyar yang berasal dari komponen SiLpa Tahun anggaran sebelumnya sebesar 35.6 milyar, dan penerimaan piutang daerah sebesar 19.6 milyar, sedang dari komponen pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar 21 milyar yang berasal dari komponen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 13 milyar dan pembayaran pokok utang sebesar 8 milyar, , sehingga selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar 33.95 milyar sehingga jika di tambahkan kepada selisih pendapatan dan belanja yang mengalami defisit sebesar 31.35 milyar maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaannya adalah sebesar 2.6 milyar.

A.5. Pembiayaan Daerah Tahun 2009

Tabel 3.23
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Kota Cilegon 2009

PEMBIAYAAN DAERAH	RENCANA	REALISASI	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	39,303,016,758.00	11,839,404,752.00	33.40%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,603,016,758.00	643,965,187.00	24,70%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	
Penerimaan Piutang Daerah	16,700,000,000.00	11,195,439,565.00	67.06%
Pencairan Dana Deposito	20,000,000,000.00	-	0.00%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16,275,872,000.00	16,275,872,000.00	100.00%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	100.00%
Pembayaran Pokok Utang	8,275,872,000.00	8,275,872,000.00	100.00%
Pemberian Pinjaman Daerah			
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito			
Pembiayaan Netto	23,027,144,758.00	-2,473,627,757.00	-11%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	15,611,843,448.00	

Pada tahun 2009 komponen penerimaan daerah terealisasi sebesar 13 milyar yang berasal dari komponen SiLpa Tahun anggaran sebelumnya sebesar 2.6 milyar, dan penerimaan piutang daerah sebesar 11 milyar, sedang dari komponen pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar 16 milyar yang berasal dari komponen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 8 milyar dan pembayaran pokok utang sebesar 8 milyar, , sehingga selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah mengalami defisit sebesar 2.4 milyar sehingga jika di tambahkan kepada selisih pendapatan dan belanja yang mengalami Surplus sebesar 18 milyar maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaannya adalah sebesar 15.61 milyar.

Tabel 3.24
Realisasi Pembiayaan Tahun 2007-2009

PEMBIAYAAN DAERAH	2007	2008	2009
Penerimaan Pembiayaan Daerah	59,387,810,140.00	55,287,997,769.00	13,802,244,243.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	19,127,324,938.00	35,670,859,490.00	2,603,016,758.00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	20,000,000,000.00	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	20,260,485,202.00	19,617,138,279.00	11,199,227,485.00
Pencairan Dana Deposito	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24,581,000,000.00	21,335,072,000.00	16,275,872,000.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	18,750,000,000.00	13,000,000,000.00	8,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	531,000,000.00	8,335,072,000.00	8,275,872,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	300,000,000.00	-	-
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	5,000,000,000.00	-	-
Pembiayaan Netto	34,806,810,140.00	33,952,925,769.00	-2,473,627,757.00

PEMBIAYAAN DAERAH	2007	2008	2009
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35,670,859,490.00	2,603,016,758.00	15,611,843,448.00

A.6. Pembiayaan Daerah Tahun 2010

Tabel 3.26
Rencana Dan Realisasi Pembiayaan 2010

Pembiayaan Daerah	Rencana
Penerimaan Pembiayaan Daerah	35,000,000,000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
Penerimaan Piutang Daerah	15,000,000,000.00
Pencairan Dana Deposito	20,000,000,000.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22,827,592,000.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	4,827,592,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	12,000,000,000.00
Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	-
Pembiayaan Netto	12,172,408,000.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Pada tahun 2010 penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar 35 milyar yang bersumber dari penerimaan piutang daerah sebesar 15 milyar dan pencairan dana deposito sebesar 20 milyar, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperkirakan sebesar 22.8 milyar yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 6 milyar, pembayaran pokok utang sebesar 4.8 milyar dan pemberian pinjaman daerah sebesar 12 milyar, sehingga jika ditambahkan kepada selisih pendapatan dan belanja yang mengalami defisit sebesar 12 milyar maka diperkirakan tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

B. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan adalah merupakan pemahaman terhadap komponen Anggaran Daerah untuk menanggulangi defisit dari selisih antar pendapatan dan belanja. Namun sesungguhnya defisit riil anggaran itu sendiri tidak hanya berasal dari defisit belanja terhadap pendapatan, namun juga berasal dari pengeluaran pembiayaan, antara lain untuk pembayaran utang daerah serta penyertaan modal.

Tabel 3.26
Defisit Riil Anggaran

NO	Uraian	2007 (Juta Rp)	2008 (Juta Rp)	2009 (Juta Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	463,434.19	554,373.09	600,063,57
2.	Realisasi Belanja Daerah	461,303.98	585,723.00	582,812,92
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24,581.00	21,335.07	16,275.87
	Defisit riil	(22,450.79)	(52,684.98)	974.78

Untuk menutup defisit riil tersebut, maka hal ini ditutup melalui penerimaan SILPA tahun sebelumnya, pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.

Tabel 3.27
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Tahun		
		2007 (Juta Rp.)	2008 (Juta Rp.)	2009 (Juta Rp.)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	19,127.32	35,670,86	643,97
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	20,000.00	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	20,260.49	19.617,14	11,195.44
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	36,837.02	2,603,12	12,814.18

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi Pendapatan Kota Cilegon merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam manajemen penganggaran keuangan daerah terutama berkaitan dengan perencanaan Pembangunan. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 maka dibutuhkan proyeksi Target Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2013-2015.

Tabel 3.28
Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2013-2016 (Rp.)

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		REALISASI	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA
	PENDAPATAN DAERAH	858.320.973.326	1.069.436.272.751	934.766.873.707	1.035.668.513.400	1.098.155.423.400	1.165.280.060.200
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	253.212.004.831	339.074.767.867	208.187.737.698	277.975.090.000	289.636.140.000	301.809.120.000
1.1	PAJAK DAERAH	172.965.160.026	152.270.000.000	126.565.000.000	187.487.000.000	194.911.000.000	203.409.000.000
1.2	RETRIBUSI DAERAH	15.473.857.204	10.859.235.000	110.109.047.186	16.949.700.000	17.697.000.000	18.371.350.000
1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.072.057.393	7.276.339.412	10.109.047.186	10.750.000.000	13.750.000.000	16.250.000.000
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	54.700.930.208	168.669.193.455	61.413.690.512	62.788.390.000	63.278.140.000	63.778.770.000
2	DANA PERIMBANGAN	417.147.321.024	521.390.301.662	584.162.409.009	572.460.039.400	616.815.999.400	664.716.156.200
2.1	BAGI HASIL PAJAK & BAGI HASIL BUKAN PAJAK	97.707.681.024	115.477.043.662	117.262.409.009	73.648.039.400	78.139.039.400	82.985.039.400
2.2	DANA ALOKASI UMUM	315.485.240.000	405.584.438.000	461.400.000.000	498.312.000.000	538.176.960.000	581.231.116.800
2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	3.954.400.000	328.820.000	5.500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	187.961.647.471	208.971.203.222	142.416.727.000	185.233.384.000	191.703.284.000	198.754.784.000
3.1	HIBAH	0	0	0	0	0	0
3.2	DANA DARURAT	0	0	0	0	0	0
3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	71.300.565.341	109.663.919.222	108.716.727.000	116.526.100.000	122.996.000.000	130.047.500.000
3.4	DANA PENYESUIAN DAN OTONOMI KHUSUS	91.061.082.130	58.707.284.000	28.400.000.000	58.707.284.000	58.707.284.000	58.707.284.000
3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	25.600.000.000	40.600.000.000	5.300.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

Keterangan : Pada Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah Tahun 2012 terdapat Pendapatan dari Penggantian Investasi Kubang Sari sebesar Rp. 98.510.879.600,-

Sumber : DPPKD Kota Cilegon, Tahun 2012

Tabel 3.29
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

NO.	URAIAN	2007	2008	2009	2010
A	Belanja Langsung	56,439,975,386	56,939,245,141	53,557,427,520	59,320,110,599
1	Belanja Honor PNS Khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-		
2	Belanja Honor Non PNS Khusus untuk guru dan tenaga medis	7,270,525,000	7,948,949,000	7,425,055,000	16,985,775,000
3	Belanja Honor PNS Khusus (Tim Pengadaan/Tim Pemeriksa)	1,038,060,000	2,100,525,000	945,250,000	885,965,175
4	belanja beasiswa pendidikan PNS	544,100,000	908,800,000	445,500,000	455,000,000
5	Belanja Jasa Kantor (listrik air telepon)	12,358,993,956	15,369,934,816	15,429,828,040	15,407,677,264
6	Honor Tenaga kerja Non PNS	21,458,775,000	14,183,960,900	11,595,062,220	7,787,524,000
7	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Bermotor	8,089,778,850	10,514,364,325	12,336,963,260	11,998,168,160
8	Belanja Premi Asuransi	3,345,167,580	2,988,836,600	2,121,400,000	1,722,621,000
9	Belanja Sewa Gedung Kantor	155,000,000	160,000,000	160,000,000	200,000,000
10	Belanja Sewa Peralatan/perlengkapan kantor	2,179,575,000	2,763,874,500	3,098,369,000	3,877,380,000
B	Pembiayaan Pengeluaran	22,155,999,995	18,369,982,000	8,275,872,000	3,448,256,000
1	Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	7,155,999,995	18,369,982,000	8,275,872,000	3,448,256,000

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berikut ini diuraikan tentang kerangka pendanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015, khususnya kerangka pendanaan pada tahun 2013-2015.

Tabel 3.30
Kerangka Pendanaan Kota Cilegon Tahun 2013-2016 (Rp.)

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		REALISASI	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA
I.	PENDAPATAN	858.320.973.326	1.069.436.272.751	934.766.873.707	1.035.668.513.400	1.098.155.423.400	1.165.280.060.200
II.	BELANJA	839.872.747.801	1.000.383.449.091	1.009.775.599.323	1.035.668.513.400	1.098.155.423.400	1.165.280.060.200
II.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	434.744.116.702	490.581.482.432	467.343.646.485	523.657.642.196	538.183.635.599	531.819.110.903
II.1.1	BTL Belanja Pegawai	346.846.668.100	452.944.302.795	423.606.844.470	488.399.560.181	495.725.553.584	503.161.436.888
II.1.2	BTL Belanja Subsidi	7.654.895.053	0	0	0	0	0
II.1.3	BTL Belanja Hibah	54.729.254.130	21.693.000.000	27.178.900.000	19.499.772.000	27.899.772.000	14.499.772.000
II.1.3.1	BTL Belanja Hibah Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah		7.800.000.000	9.854.400.000	9.854.400.000	18.254.400.000	4.854.400.000
II.1.3.2	BTL Belanja Hibah Selain Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah		13.893.000.000	17.324.500.000	9.645.372.000	9.645.372.000	9.645.372.000
II.1.4	BTL Belanja Bantuan Sosial	23.385.002.176	13.328.852.952	14.638.352.000	13.838.760.000	12.638.760.000	12.238.352.000
II.1.4.1	BTL Belanja Bantuan Sosial Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah		9.211.580.000	14.263.352.000	13.463.760.000	12.263.760.000	11.863.352.000
II.1.4.2	BTL Belanja Bantuan Sosial Selain Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah		4.117.272.952	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000
II.1.5	BTL Belanja Bantuan Keuangan	669.547.243	669.550.015	669.550.015	669.550.015	669.550.015	669.550.015
II.1.6	BTL Belanja Tidak Terduga	1.458.750.000	1.945.776.670	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
II.2	BELANJA LANGSUNG (BL)	405.128.631.099	509.801.966.659	542.431.952.838	512.010.871.204	559.971.787.801	633.460.949.297
	SURPLUS/(DEFISIT)	18.448.225.525	69.052.823.660	-75.008.725.616	0	0	0
III.	PEMBIAYAAN						
III.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.485.231.900	57.433.457.425	188.519.605.216	19.500.000.000	16.500.000.000	7.500.000.000

NO.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		REALISASI	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA	RENCANA
III.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.485.231.900	37.433.457.425	188.519.605.216	19.500.000.000	16.500.000.000	7.500.000.000
III.1.2	Pencairan Dana Deposito	0	20.000.000.000	0			
III.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	27.975.401.485	113.510.879.600	19.500.000.000	16.500.000.000	7.500.000.000
III.2.1	Pembentukan Dana Cadangan (Pilkada 2015)	0	0	5.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	0
III.2.2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000	26.000.000.000	10.000.000.000	9.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
	PT. PAM	2.500.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	PT. BPRS	0	20.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	PT. PCM	0	0	0			
	Bank Jabar Banten	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
III.2.3	Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito	0	0	98.510.879.600*)	0	0	0
III.2.4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	1.975.401.485	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	18.985.231.900	29.458.055.940	75.008.725.616	0	0	0
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	37.433.457.425	98.510.879.600	0	0	0	0

Keterangan :

*) Pengalihan penggantian investasi Pelabuhan Kubang Sari untuk penyertaan modal pada PT. PCM dalam pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Kota Cilegon yang pelaksanaannya melalui pola kerjasama pemerintah swasta (KPS)